

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Ghani Rizki Fauzi
15.0102.0103

**PROGAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh :

Ghani Rizki Fauzi

15.0102.0103

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ghani Rizki Fauzi

NPM **15.0102.0103**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **20 Februari 2020**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si, Ak

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si, Ak

Ketua

Dr. Wawan Sadtyo N, M.Si., Ak., CA

Sekretaris

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

03 MAR 2020

Dra. Marlina Kurnia, M.M

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ghani Rizki Fauzi
NIM : 15.0102.0103
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 20 Februari 2020



Ghani Rizki Fauzi
NIM. 15.0102.0103

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ghani Rizki Fauzi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 4 September 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Karang Kidul RT 01 / 07 Kota Magelang.
Jawa Tengah
Alamat Email : rizkighani29@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar	(2004-2009)	: SDN 1 Rejowinangun Selatan Magelang
SMP	(2009-2012)	: SMPN 8 Magelang
SMA	(2012-2015)	: SMAN 2 Magelang
Perguruan Tinggi	(2015-2020)	: SI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 20 Februari 2020
Peneliti



Ghani Rizki Fauzi
NIM. 15.0102.0103

MOTTO

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga”

(KH Abdurrahman Wahid)

“Jangan banyak mencari banyak, carilah berkah. Banyak bisa didapat dengan hanya meminta. Tapi memberi akan mendatangkan berkah”

(KH Ahmad Mustofa Bisri)

“Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang”

(Emha Ainun Nadjib)

“Proses sama pentingnya dibanding hasil. Hasilnya nihil tak apa. yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan “

(Sujiwo Tejo)

“Hidup sungguh sederhana yang hebat hanya tafsirannya”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Tidak akan ada hasil sampai kita mengerjakan sesuatu. Setidaknya, berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hanya mengomentari orang yang mungkin pekerjaannya tidak dapat kita selesaikan. Hasil yang baik tidak datang karena satu kali mencoba saja. Bahkan hasil yang baik belum tentu langsung datang pada mereka yang sudah berkali-kali mencoba. Bersabarlah, segala sesuatu awalnya sulit sebelum menjadi mudah”

(Ghani Rizki Fauzi)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang)**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Dra. Marlina Kurnia, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Siti Noor Khikmah, SE., M.Si. Ak. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan, perhatian dan doa.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga dan juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak

kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Magelang, 20 Februari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ghani Rizki Fauzi', with a stylized flourish at the end.

Ghani Rizki Fauzi

NIM. 15.0102.0103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHANAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	10
A. Telaah Teori	10
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	17
C. Perumusan Hipotesis	18
D. Model Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Populasi dan Sampel	23
B. Data Penelitian	24
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	26
D. Metoda Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Statistik Deskriptif	36
B. Statistik Deskriptif Responden	36
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	38
D. Uji Validitas Dan Reliabilitas	40
E. Analisis Regresi Linier Berganda	43
F. Hasil Pengujian Hipotesis	44
G. Pembahasan	49
 BAB V KESIMPULAN	 54
A. Kesimpulan	54
B. Keterbatasan Penelitian	55
C. Saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	 57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fenomena Penelitian	3
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	16
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	36
Tabel 4.2 Profil Responden	36
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel	38
Tabel 4.4 <i>Cross Loading Factor</i>	41
Tabel 4.5 Pengujian Reliabilitas	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	43
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	45
Tabel 4.8 Hasil Uji F	46
Tabel 4.9 Hasil Uji t	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Penelitian	21
Gambar 3.1 Penerimaan dan Penolakan Uji F	34
Gambar 3.2 Kurva Uji t Positif	34
Gambar 4.1 Uji Goodness Fit	46
Gambar 4.2 Perbandingan t hitung dan t tabel Kualitas Sumber Daya Manusia	47
Gambar 4.3 Perbandingan t hitung dan t tabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	48
Gambar 4.4 Perbandingan t hitung dan t tabel Sistem Pengendalian Internal	48
Gambar 4.5 Perbandingan t hitung dan t tabel Pemahaman Basis Akrua	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner	60
Lampiran 2. Tabulasi Data Pengisian Kuesioner	65
Lampiran 3. Hasil Uji Analisis Data	74
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian	78
Lampiran 3. Bukti Penyebaran Kuesioner	80

ABSTRAK

FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang)

Oleh:

Ghani Rizki Fauzi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sampel yang diambil dari penelitian ini sebanyak 69 anggota dengan *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan program SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Perkembangan otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi. Ada banyak pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan yang telah dipublikasikan pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kebijakan pemerintah pusat tentang pemberlakuan otonomi daerah merupakan langkah dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya, dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik:

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah antara lain adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006). Pada saat ini, pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012)

Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi yang disajikan tersebut. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia terutama di wilayah Kedu merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah di wilayah Kedu sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Fenomena Opini

Tahun	Opini					
	Kota Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Kebumen
2018	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2017	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2016	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2015	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber :semarang.bpk.go.id

Berdasarkan data tabel diatas didapati bahwa dari satu kota dan lima kabupaten di wilayah Kedu, opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD terdapat dua kabupaten yang mendapatkan opini WDP pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo dan pada penyusunan skripsi ini dipilih Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian. Hal tersebut didasari adanya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang tercermin dari hasil opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dimana pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP dan tiga tahun selanjutnya mendapatkan opini WTP yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2018 disamping itu dengan alasan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang.

Fenomena opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan sangat tergantung dari kualitas laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kompilasi laporan Organisasi Pemerintah Daerah. Semakin luas wilayah dan semakin banyak Organisasi Pemerintah Daerah dalam satu pemerintah daerah maka akan semakin banyak membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan. Hal yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk

mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Adanya penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan, menjadikan perlunya sumber daya manusia yang benar-benar memahami logika akuntansi.

Pemahaman Sumber Daya Manusia yaitu khususnya pegawai bagian akuntansi, terkait konsep Akuntansi Berbasis Akrual akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Pegawai OPD Kabupaten Magelang khususnya bagian akuntansi harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Magelang. Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan pegawai seringkali dilakukan daya manusia yang kompeten. tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Widyaningrum, 2016). Faktor

penentu lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi Informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Faktor lain yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemahaman regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Kurniawati (2018) yang meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan hasil yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: **pertama**, tempat dan objek penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan amatan OPD yang berada di Kabupaten Magelang dikarenakan adanya perbaikan kinerja yang dilakukan yang tercermin dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang memperoleh opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2015 dan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga tahun selanjutnya (www.kabupatenmagelang.go.id). **Perbedaan yang kedua**, menambah variabel pemahaman basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan karena perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi (Umar Sako (2018). Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah, yang merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa anggota telah memenuhi cara penyusunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga nantinya akan menunjukkan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap kalitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dimasa mendatang:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik *faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*.

2. Kelembagaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi lebih untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan dalam rangka mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien, menyampaikan laporan keuangan secara berkualitas dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memberikan bahan pertimbangan bagi para *stakeholder* dalam menilai sebuah organisasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Resource Based View Theory*

Resource based view (RBV) Theory atau teori berbasis sumberdaya menekankan sumber daya sebagai penentu dari keunggulan kompetitif dan kinerja. Berdasarkan teori RBV, Barney (1991) mengajukan definisi formal yang berkaitan dengan pengertian keunggulan bersaing berkelanjutan yaitu keunggulan yang dicapai terus menerus dengan mengimplementasikan strategi pencapaian nilai-nilai unik yang tidak dimiliki pesaing. Pandangan RBV terhadap keunggulan kompetitif meyakini bahwa sumberdaya internal lebih penting bagi daripada berbagai faktor eksternal dalam upaya untuk meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitif.

Para penganut pandangan RBV percaya bahwa kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh beragam sumberdaya internal yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori luas yaitu sumberdaya fisik, sumberdaya manusia dan sumberdaya organisasional. Sumberdaya fisik dalam konteks Organisasi Pemerintah Daerah mencakup seluruh sarana prasarana dan perlengkapannya, lokasi, dan juga teknologi. Sumberdaya manusia mencakup seluruh pegawai, pelatihan, pengalaman, intelegensi (kecerdasan), pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.

Perbedaan sumber daya dan kemampuan ini akan memberikan keuntungan yang kompetitif dimana kemampuan organisasi dalam mengelola

sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi organisasi tersebut. Asumsi dalam teori ini dalam konteks sektor publik adalah bagaimana organisasi sektor publik dapat mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan. Barney (1991) menyatakan bahwa dalam RBV, perusahaan tidak dapat berharap untuk membeli atau mengambil keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh suatu organisasi lain, karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Salah satu wujud dari peran penting tersebut dapat dilihat dari penggunaan pengetahuan yang menghasilkan inovasi serta sebagai landasan untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pemakai dan *stakeholders*.

a. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan karakteristik kualitatif dari suatu laporan yang menyajikan mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta informasi lain yang merupakan hasil proses akuntansi selama periode tertentu yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Mardiasmo, 2006). Indikator variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuaikan dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Widyaningrum, 2016).

b. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Afriyanti, 2016). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Organisasi Pemerintah Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Alimbudiono & Fidelis (2014), untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk (Soimah, 2014). Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas sumber daya manusia semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Jogiyanto, 1995) pemanfaatan teknologi adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, dimana pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen (Jogiyanto, 1995).

Teknologi Informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ditujukan agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri (Kurniawati, 2018).

d. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu kualitas laporan keuangan, efisiensi dan

efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian internal akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan dengan pengendalian internal administratif.

Tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Zuliarti, 2017). Dengan sistem pengendalian internal, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi yang menunjang kelancaran kerja dalam sistem tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*). Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang disyaratkan.

e. Pemahaman Basis Akrua

Pemahaman regulasi berkaitan dengan tingkat pemahaman suatu institusi terhadap regulasi yang diterapkan. Penelitian mengenai pemahaman regulasi dilakukan oleh Kartikasari (2015). Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pemahaman regulasi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual baru diwajibkan pada tahun 2015 walaupun sudah diundangkan sejak tahun 2010. Alasan penerapan yang cukup lama ini mengindikasikan bahwa masih adanya institusi yang perlu diberikan pelatihan mengenai aturan baru. Pemahaman atas regulasi memegang peran penting dalam kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemahaman institusi terhadap regulasi baru maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan institusi tersebut. Pemahaman atas regulasi berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan pelaporan keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Institusi sektor publik yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai PP 71 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ida Ayu Enny Kiranayanti (2016)	Pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal dan terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2.	Intan kurniawati (2018)	Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3.	Umar Sako (2018)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman basis akrual mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan
4.	Eli Budi Santoso (2016)	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah
5.	Triyanti (2018)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pandangan Berbasis Sumber Daya atau *Resource Based View* (RBV) terhadap keunggulan kompetitif meyakini bahwa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada berbagai faktor eksternal dalam upaya untuk meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Para penganut RBV percaya bahwa kinerja organisasional akan sangat ditentukan oleh beragam sumber daya internal yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori luas yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya organisasional. Sumber daya manusia mencakup seluruh karyawan, pelatihan, pengalaman, intelegensi (kecerdasan), pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Teori RBV berpendapat bahwa sumber daya yang sesungguhnya dapat membantu organisasi dalam menangkap dan menetralkan permasalahan (David, 2009).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Kiranayanti, 2016). Penelitian yang dilakukan Kurniawati (2018) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Triyanti (2018) menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_1 : Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan atau ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing* (Indriasari & Nahartyo, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Santoso

(2018) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan RBV menyatakan bahwa kinerja organisasional akan sangat ditentukan oleh beragam sumber daya internal khususnya sumber daya manusia. Dalam hal ini sumber daya manusia mencakup seluruh karyawan, pelatihan, pengalaman, intelegensi (kecerdasan), pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi operasi (Kurniawati, 2018). Tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Zuliarti, 2017) Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan.

Penelitian yang dilakukan Azlan (2016) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Sari & Witono (2014) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃ : Sistem Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pemahaman Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

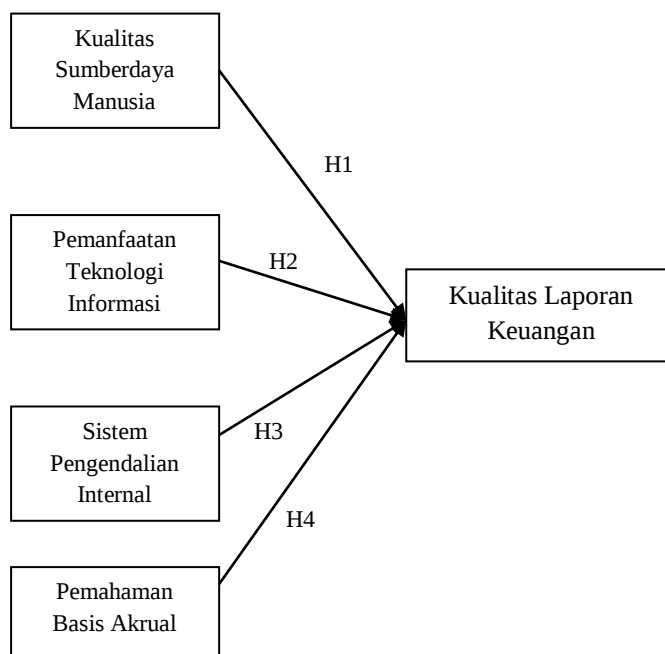
Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu

hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Tickell, 2010). Tinggi rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemahaman basis akrual dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H₄ : Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Model Penelitian



Gambar.2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian keuangan atau penatausahaan keuangan.

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas, Badan dan Kantor yang termasuk dalam OPD Kabupaten Magelang. Jumlah Dinas, Badan dan Kantor yang diambil di Kabupaten Magelang adalah berjumlah 23. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah :

1. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada OPD.
2. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian keuangan atau penatausahaan keuangan.
3. Responden ditetapkan pada kepala bagian keuangan, staf pencatatan keuangan dan staf pemegang kas OPD.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan atau akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penentuan responden dengan jumlah 69 untuk 23 OPD dengan masing-masing OPD terdiri dari 3 responden didasarkan pada alasan (Prasetyo, 2015) :

1. Maksimal 3 responden pada setiap OPD supaya unit analisis bersifat heterogen dan persepsi responden dapat menyebar secara merata di OPD.
2. Penentuan 3 responden pada setiap OPD hanya akan melihat persepsi kepala bagian keuangan, staf pencatatan keuangan dan staf pemegang kas.
3. Penentuan responden pada setiap OPD didasarkan pada asumsi bahwa persepsi kepala bagian keuangan, staf pencatatan keuangan dan staf pemegang kas yang mengetahui secara pasti mengenai kualitas laporan keuangan pada setiap OPD.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini digolongkan penelitian Kuantitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan OPD di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode *purosive sampling* dengan

sumber data adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2015). Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing OPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada OPD tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan variabel yang diukur. Pengukuran instrumen menggunakan skala Likert, dengan lima alternatif jawaban yang kemudian dimodifikasi menjadi empat alternative jawaban dengan menghilangkan jawaban bagian tengah.

Modifikasi skala Likert meniadakan kategori jawaban yang di tengah berdasarkan pertimbangan bahwa, jawaban yang tersedia di tengah akan menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah (*central tendency effect*), terutama bagi responden yang ragu-ragu atas kecenderungan jawaban (Sugiyono, 2015). Selanjutnya jika disediakan kategori jawaban di tengah, maka data penelitian akan banyak hilang sehingga mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijangkau dari responden. Skala *Likert* mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas sebuah fenomena (Sugiyono, 2015). Jawaban dari setiap pertanyaan mempunyai skor dari sangat setuju sampai

sangat sangat tidak setuju dan masing – masing pertanyaan diberi skor untuk kemudahan dalam penelitian

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan kualitas adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ketiga karakteristik ini kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan standar kualitas jabatan PNS. Indikator variable kualitas sumberdaya manusia dilihat dari:

- a. Kapasitas staf, merupakan standarisasi kapasitas staf bagian keuangan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
- b. Tupoksi, merupakan uraian peran dan fungsi yang jelas bagi seorang staf bagian keuangan atau akuntansi yang ditunjang dengan sistem dan prosedur yang jelas.
- c. Pengembangan, merupakan upaya penguasaan dan pengembangan keahlian staf, baik formal maupun non formal.

Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari peneliitian Hanim (2015) dengan menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan

menggunakan skala *linkert* dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Nurillah, 2014). Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari pengelolaan data keuangan yang merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh. Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian Hanim (2015) dengan menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan menggunakan skala *linkert* dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju

3. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatu, berkait satu sama lain dan menjadi bagian integral dari instansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Indikator variabel SPI didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008:

- a. Lingkungan pengendalian, merupakan upaya untuk meningkatkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya.
- b. Penilaian risiko, merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang akan terjadi pada organisasi sector publik.
- c. Kegiatan pengendalian merupakan upaya untuk melakukan review atas kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan termasuk didalamnya pemisahan tugas.

Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian Hanim (2015) dengan menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan menggunakan skala *linkert* dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju

4. Pemahaman Basis Akrua

Pemahaman basis akrual memegang peranan penting dalam kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemahaman institusi maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan institusi tersebut. Pemahaman basis akrual berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Institusi sektor publik yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai PP Nomor 71 tahun 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator variable pemahaman basis akrual dapat dilihat dari pengetahuan dan kemampuan berhubungan dengan akuntansi. Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian Umar Sako (2018) menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur

dengan menggunakan skala *linkert* dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju

5. Kualitas Laporan Keuangan

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para penggunanya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Indikator variabel kualitas laporan keuangan didasarkan pada PP Nomor 71 tahun 2010:

- a. Relevan, informasi disajikan secara lengkap, tepat waktu, memiliki manfaat umpan balik dan memiliki manfaat produktif
- b. Andal, informasi disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral.
- c. Dapat dibandingkan, informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- d. Dapat dipahami, informasi dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian Hanim (2013) dengan menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan menggunakan skala *linkert* dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas mengenai variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, dan sebagainya (Ghozali, 2018). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan (indikator) pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018), yaitu konstruk atau variable yang diteliti periset.

Dalam menguji validitas instrument kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). CFA digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indicator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variable. Jika masing-masing indicator merupakan indicator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai loading faktor yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett of Sphericity* merupakan uji statistic untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variable. Semakin besar sampel menyebabkan Barlett test semakin sensitive untuk mendeteksi korelasi antar variable. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variable dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyen-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor dengan nilai cross loading (Ghozali, 2018). Alasan penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi orthogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. Sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi orthogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, dan *Promax* (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah bebas dari bias dan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrument dalam suatu variable, instrumen yang dipakai dalam variable tersebut dikatakan handal/reliable jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2018)

3. Pengujian Regresi Linier Berganda

Model yang dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Model dalam penelitian ini adalah:

$$KLK = a + b1.KSDM + b2.PTI + b3.SPI + b4.PBA + e$$

Di mana:

KLK = Kualitas Laporan Keuangan

a = konstanta

b1,b2,b3,b4 = koefisien regresi

KSDM = Kualitas Sumber Daya Manusia

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

SPI = Sistem Pengendalian Intern

PBA = Pemahaman Basis Akrua

e = *standarderror*

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah cocok atau tidak (Ghozali, 2018). Adapun cara melakukan uji F sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok

H0 = berarti secara simultan atau bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan antara KSDM, PTI, SPI, PBA dengan KLK

H1 = berarti secara simultan atau bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara KSDM, PTI, SPI, PBA dengan KLK

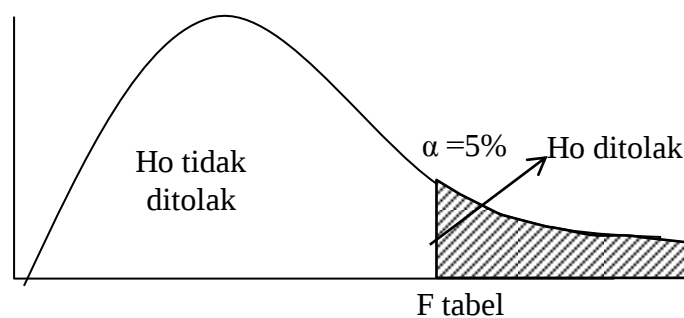
2) Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05)

3) Membandingkan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria:

- (a) Nilai signifikan $F < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- (b) Nilai signifikan $F > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

4) Membandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Jika F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- (b) Jika F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

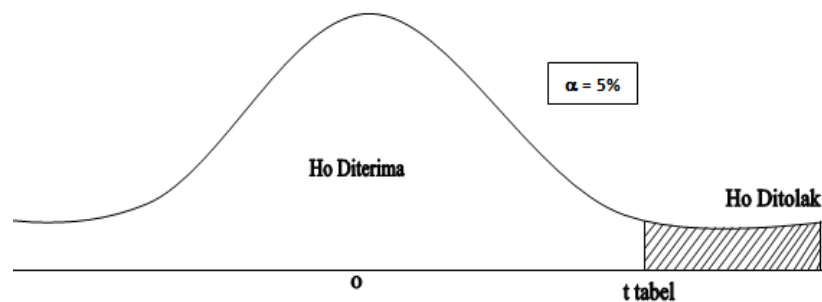


Gambar 3.1
Penerimaan dan Penolakan
Uji F

b. Uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dikatakan berpengaruh signifikan apabila $\text{sig.} < \alpha$. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bila nilai signifikan $t < 0,005$, maka H^0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap dependen.
- b) Apabila nilai signifikan $t > 0,05$, maka H^0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada *output coefficient* dari hasil analisis berganda.



Gambar 3.2
Kurva Uji t Positiv

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen terdiri dari kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual. Sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner dengan menggunakan *purposive sampling method* dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Kualitas sumberdaya manusia dalam pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan di pemerintah daerah dilakukan secara komputerisasi, sehingga dapat membantu penyelesaian tugas dengan tepat waktu. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dengan adanya sistem

pengendalian internal, maka kecepatan dan ketepatan pencatatan akuntansi menjadi lebih dapat diandalkan sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam hal ini adalah pemahaman basis akrual.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada dinas, badan dan kantor OPD Kabupaten Magelang
2. Penelitian ini meneliti kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual sehingga masih dapat menambahkan variabel penelitian lain
3. Unit level dari analisis ini mencakup level pengukuran organisasional dan individual.
4. Kuesioner yang disebar ke setiap sampel hanya berjumlah 3 kuesioner, hal tersebut menyebabkan persepsi responden yang kurang menyebar secara merata.
5. Pada penyebaran kuesioner masih memiliki kendala dalam prosedur pengembalian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan waktu pengembalian kuesioner.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengamatan lebih luas dengan dapat menambahkan objek penelitian se Karisidenan Kedu sehingga hasil dari penelitian lebih dapat digunakan sebagai acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.
2. Pada penelitian selanjutnya, dapat ditambahkan variabel pendukung lain pada variabel independen seperti budaya organisasi dan *good government governace*
3. Pada penilitian selanjutnya unit level analisis dapat mencakup level pengukuran organisasional atau individual
4. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dalam hal jumlah kuesioner yang disebar agar persepsi responden dapat menyebar secara merata
5. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang penelitian yang sama.

Daftar Pustaka

- Afriyanti, D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Alimbudiono, R. S., & Fidelis, A. A. (2014). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” Dan Kaitannya dengan Pertanggung jawaban keuangan Daerah kepada Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 05, 18–30.
- Azlan, M. (2016). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah*.
- Barney, J. B. (1991). *Is The Resources Based view A Useful Perspective four Strategic Management Research*. 26.
- David, R. F. (2009). *Manajemen Strategis. Salemba Empat, Jakarta*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hanim, Fi. L. (2015). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Latar Belakang Pendidikan Dan Pengendalian Internal Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Hariyanto, A. (2012). Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 36.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nasional Akuntansi*.
- Jogiyanto, H. (1995). *Analisis dan Desain System Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis* (A. Offles, ed.). Yogyakarta.
- Kartikasari, D. (2015). Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*.
- Kiranayanti, I. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Kurniawati, I. (2018). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Penggunaan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntansi Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi*

Pemerintah, 2, 1–17.

- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Akuntansi Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 2337–3806.
- Prasetyo, A. R. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Good Corporate Governance terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Santoso, E. B. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*.
- Sari, P. S., & Witono, B. (2014). *Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Sancall.
- Soimah. (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tickell, G. (2010). Cash to Accrual Accounting: One Nation's Dilemma. *International Business & Economic Research*, vol 9, 71.
- Triyanti. (2018). *pengaruh kompetensi sumberdaya manusia di bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemeritah daerah*.
- Umar Sako. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Widyaningrum, C. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Zuliarti. (2017). *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*.